

**PENTINGNYA JAMINAN SOSIAL
BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT JEPANG**

SKRIPSI

**Tugas Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sastra
Pada Fakultas Sastra
Universitas Darma Persada**

Oleh:

ARKATRI ESTININ GRUM

Jurusan Asia Timur
Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang
NIM: 94.111.087
NIRM: 943123200650072



**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JAKARTA
1998**

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji oleh penguji skripsi
Fakultas Sastra Jurusan Asia Timur Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Desember 1998

Pukul : 10.30

PANITIA UJIAN

Ketua/Penguji



(Dra. Inny C. Haryono, MA)

Pembimbing/Penguji



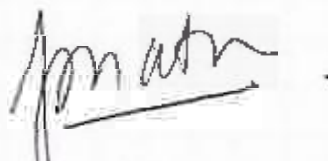
(Ekayani Tobing, SS, M.Hum)

Pembaca/Penguji



(Dra. Irma Redjeki)

Panitera/Penguji



(Dra. Tini Priantini)

LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Sastra
Pada Fakultas Sastra**

Telah disahkan pada :

Hari :

Tanggal :



**Ketua Jurusan Program Studi
Bahasa dan Sastra Jepang S1**

(Dra. Irma Redjeki)

Dekan Fakultas Sastra

(Dra. Inny C. Haryono, MA)



Seluruh isi skripsi ini sepenuhnya
Menjadi tanggung jawab penulis

Jakarta, 17 Desember 1998

Penulis

ARKATRI ESTININGRUM

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penyusunan tugas akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan akademis pada Fakultas Sastra, jurusan Bahasa dan Sastra Jepang, Universitas Darma Persada. Judul dari Tugas akhir ini adalah Pentingnya Jaminan Sosial Bagi Kehidupan Masyarakat Jepang.

Dengan selesainya tugas akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, kepada :

1. Ibu Ekayani Tobing, SS, M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran-saran serta dorongan dalam membimbing tugas akhir ini.
2. Ibu Dra. Irma Redjeki, selaku pembaca dan Ketua Jurusan Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang, yang telah meluangkan waktunya untuk membaca, mengoreksi dan memberikan saran-saran serta memberikan izin dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Inny C. Haryono, MA, selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Darma Persada yang telah memberikan izin dan mendukung pelaksanaan serta penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Tini Priantini, selaku Panitia/Penguji skripsi.

5. Ibulrawati Agustine, SS, selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh staf pengajar dan karyawan UNSADA yang telah membantu kelancaran proses belajar penulis selama ini.
7. Orang tua dan saudara-saudaraku serta sepupuku Ika dan Daru yang telah membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman terbaikku Mona, Ralih, Rini, Lusi, Pipit, Ambarrini & Retno, Anna, Monik, Daesy, Gati, Mawar dan semua teman-teman di UNSADA khususnya Kelas D angkatan '94, yang sudah membantu dan memberikan doa serta dorongan.
9. Tanteuku Sri Hartini di Pondok Kelapa sekeluarga thanks atas bantuannya.
10. Tanteuku Edang sekeluarga di Mampang, thanks atas doanya.

Penulis sangat menyadari, bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran-saran maupun kritikan-kritikan yang memberikan dorongan bagi kesempurnaan tugas akhir ini.

Penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penulisan tugas akhir ini.

Jakarta, 17 Desember 1998

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	8
1.3. Ruang Lingkup	9
1.4. Tujuan Penulisan	9
1.5. Metode Penulisan	9
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II KEPENDUDUKAN	11
2.1. Pertumbuhan Penduduk	11
2.2. Kepadatan Penduduk	19
2.3. Susunan Penduduk	25
BAB III ASURANSI	30
3.1. Pengertian Asuransi	30
3.1.1. Resiko	32
3.1.2. Pencegahan Terjadinya Kerugian	34

3.1.3.	Faedah Asuransi.....	35
3.2.	Sejarah Asuransi.....	36
3.2.1.	Perusahaan Asuransi Swasta.....	38
3.2.2.	Sistem Asuransi Pemerintah.....	39
3.3.	Sistem Asuransi Sosial.....	40
3.3.1.	Asuransi Kesehatan.....	39
3.3.2.	Asuransi Kesehatan Nasional.....	46
BAB IV	PENSIUN.....	48
4.1.	Sistem Pensiun.....	48
4.2.	Biaya Pensiun.....	53
4.3.	Tunjangan Pensiun.....	54
4.4.	Asuransi Pensiun Kesejahteraan.....	54
BAB V	KESIMPULAN.....	59
LAMPIRAN.....		62
GLOSSARY.....		64
DAFTAR PUSTAKA.....		66

RENUNGAN:

**“Sesungguhnya dalam penciptaan
langit dan bumi, dan silih bergantinya
malam dan siang terdapat tanda-tanda
bagi orang-orang yang berakal “
(Q.S. Ali Imran: 190)**



Salam Takzim untuk:

**Ibunda dan ayahanda serta
saudara-saudaraku tercinta
terima kasih atas semua
bantuan dan doanya**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem jaminan sosial dimulai pada awal Restorasi Meiji tahun 1868, pada saat bantuan umum berupa bantuan kepada orang yang berpenghasilan rendah dijamin oleh negara, jaminan sosial tersebut dalam bentuk yang lebih baik namun tidak berkembang sampai berakhirnya Perang Dunia II. Sistem jaminan sosial yang diajukan oleh Kabinet Komite Pertimbangan Sistem Jaminan Sosial pada tahun 1950, memaknai bentuk jaminan sosial dalam arti yang luas dan menunjukkan beberapa program yang terdiri dari asuransi sosial, bantuan umum, kesejahteraan sosial, dan kesehatan umum. Dalam "Kodansha Encyclopedia of Japan" dijelaskan bahwa:

"The term social security, defined as a government policy to ensure its citizens of a minimum standard of living, is supported by twin pillar of social insurance and social aid. The main objective fulfilled by social security is to counter problems such as sickness, injury, disability, old age, death, unemployment, and large families. Consequently, social security programs can be defined as being made up of all systems and institutions providing social security to the citizens."¹

Maksudnya adalah program jaminan sosial (*shakai hoshō seido*) ditetapkan sebagai kebijaksanaan pemerintah untuk menjamin standar minimum hidup warga negara yang didukung oleh dua pilar yaitu asuransi

¹ Niwata Noriaki, "Social Security Programs," *Kodansha Encyclopedia of Japan* (Tokyo, 1983), hal.208.

sosial dan bantuan sosial. Sasaran utama yang akan dipenuhi oleh jaminan sosial adalah memecahkan masalah seperti penyakit, luka-luka, cacat, lanjut usia, kematian, pengangguran dan keluarga besar. Oleh karena itu, program jaminan sosial dapat dibentuk berdasarkan semua sistem seperti asuransi sosial, kesejahteraan sosial, bantuan umum, perawatan medis dan kesehatan umum, bantuan kepada anak-anak, kebijaksanaan lingkungan, pensiun serta bantuan korban perang dan lembaga yang menyediakan jaminan sosial bagi warga negara.

Dalam pengertiannya yang murni, jaminan sosial diartikan sebagai asuransi sosial maksudnya jaminan sosial sebagai perlindungan terhadap hilangnya penghasilan, seperti dalam pemberhentian kerja, dan atau terhadap tambahan biaya hidup, seperti dalam perawatan waktu sakit.²

Pengertian jaminan sosial yang lain dapat kita lihat dalam kuliah Kenneth Thomson, seorang tenaga ahli pada Sekretariat Jenderal ISSA di Jenewa, dalam Regional Training Seminar ISSA di Jakarta bulan Juni 1980. Ia mengatakan bahwa Jaminan sosial sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk resiko atau peristiwa - peristiwa tertentu dengan tujuan, sejauh mungkin untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya sebagian besar penghasilan dan untuk memberikan pelayanan medis dan atau jaminan

² John G. Trumbull, C. Arthur Jr, Earl F. Chell, dalam Kertonegoro " *Jaminan, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta : PT.Muljana,1983), hal.26.

keuangan terhadap konsekwensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.

Sedangkan menurut Drs. Harun Alrasjid, Direktur Jenderal Bantuan Sosial di Jakarta tahun 1978, Jaminan sosial merupakan suatu perlindungan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan taraf hidup rakyat³

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi keterbelakangan (dalam hal kesehatan, pendidikan, dll), ketergantungan (pada pensiun dan asuransi), keterlambatan, serta kemiskinan pada umumnya.

Jaminan sosial (*shakai hoshō*) merupakan salah satu instrumen yang ada dalam masyarakat, jaminan sosial tersebut digunakan oleh masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi resiko-resiko. Resiko-resiko itu berupa resiko terhadap harta benda yang bisa menyangkut kerusakan atas harta kekayaan serta resiko usaha yang berupa kegagalan usaha suatu perusahaan dan sebagainya. Dalam dunia modern, masyarakat serta perorangan secara sadar dan sistematis selalu berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan baik yang bersifat pencegahan sebelum resiko itu terjadi, maupun penanggulangan setelah terjadinya kejadian merugikan itu. Namun demikian tindakan-tindakan itu biasanya hanya dapat mengurangi intensitas resiko dan kesulitan atau bahkan tidak mungkin menghilangkannya sama sekali. Karena

³ Drs. Harun Alrasjid, *Ibid.*, hal.27.

kompleksitasnya resiko-resiko itu maka ruang lingkupnya hanya mencakup resiko ekonomi dan resiko sosial secara kolektif . Dalam menghadapi resiko ekonomis jaminan sosial hanya menangani masalah-masalah yang terbatas. Demikian pula resiko sosial yang ditanggulangi terbatas pula dan tidak menangani misalnya masalah rasial, atau secara perorangan, masalah perkawinan, dll. ⁴ Sistem jaminan sosial umum yang lengkap muncul di Jepang tahun 1961 mencakup pensiun dan asuransi untuk seluruh bangsa. Sistem ini meluas pada dasawarsa 1970-an, setelah pertumbuhan ekonomi yang pesat menciptakan tuntutan jaminan sosial yang baru dikalangan rakyat. Pada awal tahun 1970 pemerintah mengambil beberapa tindakan untuk memenuhi tuntutan tersebut, termasuk peningkatkan asuransi kesehatan dan manfaat pensiun, memperbaiki asuransi pengangguran dan memberi tunjangan anak.

Dewasa ini, sistem jaminan sosial di Jepang terdiri dari 8 bagian antara lain yaitu Asuransi Sosial (meliputi perawatan medis, pensiun, asuransi kecelakaan, dan asuransi pengangguran), Kesejahteraan Sosial (meliputi bantuan kepada orang yatim , penderita cacat mental dan fisik dan manula), Bantuan Umum (meliputi bantuan kepada orang yang berpenghasilan rendah), Perawatan Medis dan Kesehatan Umum (meliputi pelayanan pembuangan

⁴ Kertonegoro Sentanoe, *Ibid...*

sampah, pelayanan kesehatan umum), Tunjangan Anak (untuk anak-anak dibawah usia 15 tahun, bantuan untuk keluarga dengan penghasilan rendah dan memiliki anak lebih dari 3), Kebijakan Lingkungan (pencegahan polusi dan program perlindungan lingkungan), Pensiun (pensiunan perang dunia II dan mantan pegawai pemerintah) serta Korban Bantuan Perang.⁵

Sejarah sistem jaminan sosial di Jepang dimulai dengan maksud untuk memecahkan masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat. Disamping asuransi kesehatan , komponen utama dari sistem jaminan sosial yang lain adalah pensiun. Oleh karena itu pemerintah menaruh perhatian yang besar pada kedua hal tersebut. Kepentingan sistem jaminan sosial akan bertambah selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya, hal ini dikarenakan Jepang memasuki pertumbuhan masyarakat yang berusia lanjut dan sebagian besar dari yang berusia lanjut itu tergantung pada peranan pensiun.

Pada tahun 1957 total pengeluaran untuk jaminan sosial termasuk pensiun pegawai negeri dan mantan tentara berjumlah 584.400.000 yen atau 7,22 % dari pendapatan nasional. Jika termasuk biaya pengangguran, totalnya mencapai 633.000.000 yen. Maka kenaikan biaya total untuk jaminan sosial pada beberapa tahun kemudian sangat tinggi. Jika kita menghitung pertambahannya pada tahun 1950 dengan angka sebesar 100, maka tahun 1957 angka tersebut akan menjadi 353. Jika kita menyadari bahwa daftar

⁵ Nawata Noriaki, O.p.Cit., hal.210.

pendapatan nasional bertambah hanya 239 pada saat yang sama, kita dapat melihat perkembangan biaya jaminan sosial yang pesat dewasa ini. Jumlah total dari perlanggung jawaban negara untuk jaminan sosial pada tahun 1957 sebesar 179000000 yen yang merupakan 15,7 % dari total anggaran pemerintah.⁶

Pada tahun fiskal 1985, jumlah seluruh biaya jaminan sosial di Jepang meningkat 6,2 % diatas tahun sebelumnya dan mencapai 35,6 trilyun yen. Ini berarti pengeluaran 294.500 perkepala dan 925.300 perrumahtangga. Pensiun sebesar 17,1 trilyun, perawatan medis 14,2 trilyun dan kategori-kategori lain sebesar 4,5 trilyun. Biaya jaminan sosial bertambah 2,8 kali pada dasawarsa 1975 sampai ke tahun fiskal 1985, sedangkan pendapatan nasional hanya meningkat 1,9 kali. Pembayaran jaminan sosial melampaui 10 % dari pendapatan nasional dalam tahun fiskal 1976 dan sejak itu tetap meningkat dan mencapai 14,0 % dari pendapatan nasional pada tahun fiskal 1985.

Undang-undang penelapan asuransi sosial dan program bantuan umum dimaksudkan untuk menjamin standar minimum hidup seluruh warga negara. Undang-undang jaminan sosial di Jepang mensahkan beberapa jenis program antara lain bantuan umum untuk kemiskinan dan yang berpenghasilan rendah; program asuransi sosial terutama untuk para pekerja ; program kesejahteraan sosial untuk anak-anak, para manula, penderita cacat mental dan fisik serta

⁶ Keichiro Shimada, "The social Security System in Japan, " *Glimpses of Social Work in Japan* (Tokyo : Social Workers Internasional Club of Japan, 1978), hal.44.

program kesehatan umum/perawatan medis. Langkah nasional pertama untuk pemberantasan kemiskinan di Jepang yaitu dengan dibuatnya undang-undang pada tahun 1874 ,kemudian dikeluarkan undang-undang dana mencegah kelaparan tahun 1880 , undang-undang dana penanggulangan bencana tahun 1899 dan , undang-undang bantuan umum tahun 1929. Akibat adanya reaksi terhadap perkembangan pabrik-pabrik, juga tekanan dari dunia internasional terhadap perlindungan para pekerja maka ditetapkanlah undang-undang pabrik pada tahun 1911. Dengan adanya penetapan jaminan dari majikan kepada pekerjanya yang terluka dibawah konvensi ILO , maka ditetapkanlah undang-undang kompensasi pekerja, pada tahun 1931. Kebijakan militer dalam pemeliharaan sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembuatan undang-undang asuransi kesehatan nasional pada tahun 1938, undang-undang asuransi pelaut tahun 1939, undang-undang pensiun tahun 1941 dan undang-undang asuransi tunjangan kesejahteraan tahun 1944. Undang-undang bantuan umum - undang-undang asuransi kompensasi pekerja dan undang-undang asuransi pengangguran yang ditetapkan tahun 1947, menambah undang-undang asuransi kesehatan nasional, dll. Undang-undang kesejahteraan sosial juga ditetapkan undang-undang kesejahteraan anak tahun 1947, undang-undang kesejahteraan cacat fisik tahun 1949 dan undang-undang kegiatan kesejahteraan sosial mengeluarkan undang-undang kegiatan kesejahteraan sosial tahun 1951, berikutnya undang-undang asuransi kesehatan nasional direvisi tahun 1958, ditetapkan undang-undang

kesejahteraan cacat mental tahun 1960, undang-undang kesejahteraan manula tahun 1963, undang-undang kesejahteraan ibu dan anak tahun 1964, undang-undang tunjangan pemeliharaan anak tahun 1965. Dasar undang-undang kebijaksanaan untuk cacat mental dan fisik tahun 1970 dan undang-undang tunjangan anak-anak tahun 1971. Perluasan jumlah dan pembuktian kualitas sistem jaminan sosial telah disempurnakan, tapi ini merupakan kenalkkan yang luar biasa, beban biaya ditanggung oleh negara dan jaminan kelanjutan keuangan untuk program-program ini menjadi perhatian utama. Bermacam-macam undang-undang tersebut ditempatkan dalam prioritas utama dalam bantuan golong reyong.

Setelah Perang Dunia II undang-undang baru dibentuk tahun 1946 dan pada tahun 1947 berhasil ditetapkan menjadi dasar untuk pelaksanaan undang-undang jaminan sosial di Jepang. Undang-undang jaminan hak hidup, membuktikan kesejahteraan, jaminan sosial dan kesehatan umum.⁷

1.2. Permasalahan

Dari uraian tersebut di atas yang akan saya angkat sebagai fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah peranan sistem jaminan sosial yang ada dalam masyarakat Jepang, peranan pemerintah Jepang dalam menjalankan sistem jaminan sosial tersebut, serta dampak-dampak yang dapat terjadi apabila jaminan sosial ini tidak diterapkan di Jepang.

⁷ Kato Shunpei, Ibid, Hal. 209.

1.3. Ruang Lingkup

Sistem jaminan sosial di Jepang sudah ada sebelum Perang Dunia, walaupun perkembangannya lambat karena disebabkan oleh situasi sosial dan ekonomi pada saat itu. Dalam rencana penulisan skripsi ini saya membahas permasalahan hanya mengenai peran jaminan sosial yang bagi masyarakat Jepang dewasa ini khususnya masalah pensiun dan asuransi kesehatan yang mendapat perhatian paling besar dari pemerintah.

1.4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami serta membahas mengenai peranan jaminan sosial bagi kehidupan masyarakat Jepang dewasa ini..

1.5. Metode Penulisan

Dalam membahas permasalahan untuk penulisan skripsi ini saya menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penulis mencoba menjelaskan data-data dari berbagai sumber yang ada seperti buku-buku yang ditulis oleh kyoichi Sonoda, B.N Marbun, Herman Kahn, dll. Selain buku-buku tersebut diatas penulis juga memanfaatkan buku-buku koleksi perpustakaan Darma Persada, perpustakaan UI, perpustakaan CSIS, perpustakaan Pusat Kebudayaan Jepang, dan perpustakaan LIPI.

1.6. Sistematika Penulisan

Karya tulis akhir ini dibagi dalam lima bab dengan pokok pembahasan setiap bab adalah sebagai berikut :

1. BAB PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan penulisan, metode penulisan serta sistematika pembahasan.

2. BAB KEPENDUDUKAN

Bab ini berisikan masalah pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan susunan penduduk.

3. BAB ASURANSI

Bab ini berisi mengenai Pengertian Asuransi mencakup resiko, pencegahan terjadinya kerugian, faedah asuransi, Sejarah asuransi mencakup perusahaan asuransi swasta, sistem asuransi pemerintah, Sistem Asuransi Sosial mencakup asuransi kesehatan dan asuransi kesehatan nasional.

4. BAB PENSIUN

Bab ini berisi pembahasan mengenai sistem pensiun, biaya pensiun, tunjangan pensiun dan asuransi pensiun kesejahteraan.

5. BAB KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan mengenai sistem jaminan sosial dalam kehidupan masyarakat Jepang.